

DI LINGKUNGAN KABUPATEN PASURUAN – TANAH BENGKOK – HASIL PENGELOLAAN

2022

PERBUP. PASURUAN NO. 155, BD 2022/NO. 155

PERATURAN BUPATI PASURUAN NO. 155 TAHUN 2022 TENTANG HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DI KABUPATEN PASURUAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Pasal 143 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Pasuruan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERDA Kab. Pasuruan No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDA Kab. Pasuruan No. 3 Tahun 2021; PERBUP Kab. Pasuruan No. 2 Tahun 2017; PERBUP Kab. Pasuruan No. 12 Tahun 2017; PERBUP Kab. Pasuruan No. 27 Tahun 2017; PERBUP Kab. Pasuruan No. 3 Tahun 2019.
- Maksud ditetapkannya Perbup ini adalah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas hasil pengelolaan Tanah Bengkok. Sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dalam hasil pengelolaan Tanah Bengkok, memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Desa dalam hasil pengelolaan Tanah Bengkok, sebagai pedoman dalam menentukan nilai harga sewa Tanah Bengkok dan sebagai pedoman dalam penggunaan dan pemanfaatan Tanah Bengkok. Yang diatur dalam Perbup ini meliputi ruang lingkup pengelolaan, mekanisme penetapan harga sewa tanah bengkok, penatausahaan hasil pemanfaatan tanah bengkok, pembinaan dan pengawasan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 30 Desember 2022.